

## **ABSTRAK**

### **Muhamad Adam Analis Kusnandar: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014**

Desa merupakan Pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki organisasi Pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan BPD, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. bahwa fungsi BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes sudah berjalan namun belum secara optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu perdes yang seharusnya dirancang oleh BPD yang terjadi adalah Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Perdes berdasarkan Permendagri Nomor 111 tahun 2014, Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka di hubungkan dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, kekuatan hukum Peraturan Desa yang dibentuk tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mendasarkan pada studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, studi kasus yang relevan dengan topik permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pokok pembahasan sebagai berikut, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai legislatif di Desa, BPD membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam implementasinya fungsi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa tidak terlaksana secara optimal. Peraturan Desa mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika dalam pembentukan dan mekanismenya sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Peraturan Desa Peraturan Desa yang dibentuk oleh BPD Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan cacat formil dan batal demi hukum.

**Kata kunci: BPD, Peraturan Desa**